

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan Purwokerto (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Alamat : Jl. RA Wiryaatmaja No. 44 Purwokerto Jawa Tengah

Nomor Telepon : 0281627513

Penjelasan Umum : Penerapan Tata Kelola dalam bidang usaha perbankan sangat penting mengingat bervariasinya serta peningkatan jumlah dan kompleksitas usaha yang semakin maju. PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda) sebagai Bank yang melaksanakan fungsi intermediasi, harus mengimplementasikan prinsip-prinsip Tata Kelola atau Good Corporate Governance dalam setiap aspek pengelolaan perusahaan. Bank menyadari bahwa keberlangsungan eksistensi perusahaan tidak hanya diukur dari performa keuangan, dan peningkatan keuntungan, melainkan juga melalui performa internal perusahaan yaitu etika dan penerapan Good Corporate Governance. Melalui implementasi prinsip-prinsip GCG secara konsisten dan berkesinambungan diharapkan dapat memaksimalkan corporate value dan kepercayaan pasar. Hal ini dilakukan agar Bank memiliki daya saing yang kuat serta mampu menjaga kelangsungan usaha (sustainability) dalam jangka panjang sehingga visi dan misi perusahaan dapat tercapai.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan Purwokerto (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Sugeng Prijono, S.E.	Direktur Utama	Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR dan mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundangundangan.
2	Hari Saptono, S.H.	Direktur	Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR dan mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundangundangan.
3	Wahono, S.E.	Direktur yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan	Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR dan mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundangundangan.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Direksi senantiasa mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku serta berpedoman pada RBB yang telah disetujui dalam setiap kegiatan operasional BPR.

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

RBB menjadi pedoman dalam operasional BPR, pemutusan kebijakan, dan pengendalian perudahaan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan	: PT Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan Purwokerto (Perseroda)
Posisi Laporan	: 31 Desember 2023
Alamat	: Jl. RA Wiryaatmaja No. 44 Purwokerto Jawa Tengah
Nomor Telepon	: 0281627513
Penjelasan Umum	: Penerapan Tata Kelola dalam bidang usaha perbankan sangat penting mengingat bervariasinya serta peningkatan jumlah dan kompleksitas usaha yang semakin maju. PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda) sebagai Bank yang melaksanakan fungsi intermediasi, harus mengimplementasikan prinsip-prinsip Tata Kelola atau Good Corporate Governance dalam setiap aspek pengelolaan perusahaan. Bank menyadari bahwa keberlangsungan eksistensi perusahaan tidak hanya diukur dari performa keuangan, dan peningkatan keuntungan, melainkan juga melalui performa internal perusahaan yaitu etika dan penerapan Good Corporate Governance. Melalui implementasi prinsip-prinsip GCG secara konsisten dan berkesinambungan diharapkan dapat memaksimalkan corporate value dan kepercayaan pasar. Hal ini dilakukan agar Bank memiliki daya saing yang kuat serta mampu menjaga kelangsungan usaha (sustainability) dalam jangka panjang sehingga visi dan misi perusahaan dapat tercapai.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan Purwokerto (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Sugeng Prijono, S.E.	Direktur Utama	Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR dan mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundangundangan.
2	Hari Saptono, S.H.	Direktur	Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR dan mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundangundangan.
3	Wahono, S.E.	Direktur yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan	Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR dan mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundangundangan.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Direksi senantiasa mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku serta berpedoman pada RBB yang telah disetujui dalam setiap kegiatan operasional BPR.

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

RBB menjadi pedoman dalam operasional BPR, pemutusan kebijakan, dan pengendalian perudahaan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan Purwokerto (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Agus Prasutio, S.H., M.Si.	Komisaris Utama	Memimpin Dewan Komisaris, melakukan pengawasan terhadap Perusahaan untuk Memastikan terselenggaranya tata kelola perusahaan yang baik dan Memastikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan lembaga pemeriksa lainnya. Mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perusahaan secara Periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, paling sedikit dilakukan satu kali setiap tiga bulan dan Sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan bila dipandang perlu. Membuat dan memelihara risalah rapat. Melaporkan hasil pengawasan dan evaluasi kepada Pemegang Saham atau RUPS dan instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Membantu Komisaris Utama dalam melaksanakan tugas. Melaksanakan tugas yang telah ditetapkan oleh Komisaris Utama. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Komisaris Utama.
2	Wahyu Widiarto, S.E., M.Si.	Komisaris	Melakukan pengawasan terhadap Perusahaan untuk Memastikan terselenggaranya tata kelola perusahaan yang baik dan Memastikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan lembaga pemeriksa lainnya. Mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perusahaan secara Periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, paling sedikit dilakukan satu kali setiap tiga bulan dan Sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan bila dipandang perlu. Membuat dan memelihara risalah rapat. Melaporkan hasil pengawasan dan evaluasi kepada Pemegang Saham atau RUPS dan instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Membantu Komisaris Utama dalam melaksanakan tugas. Melaksanakan tugas yang telah ditetapkan oleh Komisaris Utama. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Komisaris Utama.
3	Drs. Sugeng, M.M., M.Si.	Komisaris dan Independen	Melakukan pengawasan terhadap Perusahaan untuk Memastikan terselenggaranya tata kelola perusahaan yang baik dan Memastikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan lembaga pemeriksa lainnya. Mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perusahaan secara Periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, paling sedikit dilakukan satu kali setiap tiga bulan dan Sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan bila dipandang perlu. Membuat dan memelihara risalah rapat. Melaporkan hasil pengawasan dan evaluasi kepada Pemegang Saham atau RUPS dan instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Membantu Komisaris Utama dalam melaksanakan tugas. Melaksanakan tugas yang telah ditetapkan oleh Komisaris Utama. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Komisaris Utama.

Rekomendasi Kepada Direksi

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan Purwokerto (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Direksi agar senantiasa mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku serta berpedoman pada RBB yang telah disetujui dalam setiap kegiatan operasional BPR.

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan Purwokerto (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Komite	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Komite Audit	Menilai kecukupan pengendalian intern termasuk proses pelaporan keuangan dengan cara melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta melakukan pemantauan atas tindak lanjut hasil audit, Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, dengan cara paling sedikit melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap: pelaksanaan tugas SKAI, kesesuaian pelaksanaan audit oleh kantor akuntan publik dengan standar audit, kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku bagi BPR, pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan satuan kerja audit intern atau pejabat yang menangani audit intern, akuntan publik, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
2	Komite Pemantau Risiko	Melakukan evaluasi dan memberikan masukan kepada Dewan Komisaris tentang kecukupan, kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan Bank, melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris serta melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pembuatan laporan yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris, mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko dari setiap aspek kegiatan usaha BPR guna mencegah potensi terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian/risiko, menilai efektivitas dan kecukupan penerapan manajemen risiko sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha BPR serta risiko yang dihadapi, memastikan bahwa Direksi (Manajemen) telah melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko, melaksanakan kajian dan tindakan yang diperlukan dalam rangka manajemen risiko sesuai dengan prinsip kehati-hatian, melakukan review pelaksanaan manajemen risiko yang terdiri dari laporan profil risiko dan laporan tingkat kesehatan bank berbasis risiko, laporan lainnya terkait dengan pengelolaan 6 (enam) jenis risiko, melakukan evaluasi kepatuhan BPR terhadap Anggaran Dasar, peraturan Otoritas Jasa Keuangan, serta peraturan perundangan lainnya yang terkait dengan manajemen risiko, melakukan penelaahan atas kebijakan baru dan dipandang dari sudut manajemen risiko atas tugas yang diberikan dari Dewan Komisaris, menyusun pedoman dan tata tertib kerja Komite dan melakukan review sesuai kebutuhan paling kurang 2 (dua) tahun sekali, melaksanakan tugas dan tanggung jawab lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris dari waktu ke waktu, membuat laporan berkala mengenai kegiatan Komite Pemantau Risiko serta hal-hal yang dirasakan perlu untuk menjadi perhatian Dewan Komisaris, membuat Self Assessment mengenai efektivitas dari kegiatan Komite Pemantau Risiko.

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Komite agar senantiasa melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai ketentuan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan Purwokerto (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Keahlian	Komite			Pihak Independen
			Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	
1	Drs. Sugeng, M.M., M.Si.	Manajemen	Ketua	Ketua	Tidak Menjabat	Ya
2	Sumarlan, S.E.	Perbankan	Anggota	Anggota	Tidak Menjabat	Ya
3	Supriyadi, S.E.	Perbankan	Anggota	Anggota	Tidak Menjabat	Ya

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Jumlah anggota Komite agar ditingkatkan sehingga dapat lebih optimal dalam pelaksanaannya.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan Purwokerto (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Komite	Program Kerja	Realisasi	Jumlah Rapat
1	Komite Pemantau Risiko	Melakukan Evaluasi dan memberikan masukan kepada Dewan Komisaris tentang kecukupan, kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan Bank. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko. Identifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko dari setiap aspek kegiatan usaha BPR untuk mencegah potensi terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian/risiko. Menilai efektivitas dan kecukupan penerapan manajemen risiko sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha BPR. Memastikan bahwa Direksi (Manajemen) telah melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko. Melaksanakan kajian dan tindakan yang diperlukan dalam rangka manajemen risiko sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Reviu pelaksanaan manajemen risiko yang terdiri dari laporan profil risiko dan laporan tingkat kesehatan bank berbasis risiko. Laporan lainnya terkait dengan pengelolaan 6 (enam) jenis risiko. Evaluasi kepatuhan BPR terhadap Anggaran Dasar, peraturan Otoritas Jasa Keuangan, serta peraturan perundangan lainnya yang terkait dengan manajemen risiko. Penelaahan atas kebijakan baru dan dipandang dari sudut manajemen risiko atas tugas yang diberikan dari Dewan Komisaris. Penyusunan pedoman dan tata tertib kerja Komite dan melakukan reviu sesuai kebutuhan paling kurang 2 (dua) tahun sekali. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris dari waktu ke waktu. Laporan berkala mengenai kegiatan Komite Pemantau Risiko serta hal-hal yang dirasakan perlu untuk menjadi perhatian Dewan Komisaris. Menyusun Self Assessment mengenai efektifitas dari kegiatan Komite Pemantau Risiko.	Program kerja dapat terealisasi sebanyak 96%. Terjadinya kekurangan hanya dari sisi penyempurnaan.	6
2	Komite Audit	Menilai kecukupan pengendalian intern termasuk proses pelaporan keuangan dengan cara melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta melakukan pemantauan atas tindak lanjut hasil audit. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, dengan cara paling sedikit melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap: pelaksanaan tugas SKAI, kesesuaian pelaksanaan audit oleh kantor akuntan publik dengan standar audit, kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku bagi BPR, pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan satuan kerja audit intern atau pejabat yang menangani audit intern, akuntan publik, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.	Program kerja dapat terealisasi sebanyak 97%. Terjadinya kekurangan hanya dari sisi penyempurnaan.	6

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan
Purwokerto (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan Purwokerto (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Direksi tidak memiliki saham di BPR

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Direksi Tidak memiliki saham pada BPR

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan Purwokerto (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Direksi tidak memiliki saham di perusahaan lain

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Direksi Tidak memiliki saham pada perusahaan lain.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan Purwokerto (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Wahono, S.E.	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Hari Saptono, S.H.	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3	Sugeng Prijono, S.E.	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Direksi tidak memiliki Hubungan Keuangan dengan Anggota Direksi lain

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan
Purwokerto (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Sugeng Prijono, S.E.	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Hari Saptono, S.H.	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3	Wahono, S.E.	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Direksi Tidak memiliki Hubungan kekeluargaan dengan Direksi lain maupun Pemegang Saham

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan Purwokerto (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Dewan komisaris tidak memiliki saham di BPR

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Dewan Komisaris tidak mempunyai kepemilikan saham di BPR

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan Purwokerto (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1			

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Dewan Komisaris tidak mempunyai kepemilikan saham pada perusahaan lain.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan Purwokerto (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Agus Prasutio, S.H., M.Si.	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Wahyu Widiarto, S.E., M.Si.	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3	Drs. Sugeng, M.M., M.Si.	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Dewan Komisari tidak memiliki hubungan keuangan dengan Pengurus lain maupun Pemegang Saham

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan Purwokerto (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Agus Prasutio, S.H., M.Si.	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Wahyu Widiarto, S.E., M.Si.	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3	Drs. Sugeng, M.M., M.Si.	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan Pengurus lain maupun Pemegang Saham.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan Purwokerto (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	3	321360000	3	868560000
2	Tunjangan	3	2081040000	0	0
3	Tantiem	3	852228676	3	264409410
4	Kompensasi berbasis saham	0	0	0	0
5	Remunerasi lainnya	0	0	0	0
	Total		3254628676		1132969410

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Pengurus tidak diperbolehkan menerima penghasilan diluar persetujuan hasil RUPSLB.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan Purwokerto (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	Tidak ada	Tidak ada
2	Transportasi	Tidak ada	Tidak ada
3	Asuransi Kesehatan	BPJS	Tidak ada
4	Fasilitas lainnya	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Direksi mendapatkan fasilitas kesehatan (BPJS) dan SPPD.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan Purwokerto (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Keterangan	Perbandingan	
		(a/b)	1
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	14,45	1
2	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,25	1
3	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,25	1
4	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	3,13	1
5	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	3,84	1

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Gaji yang dimaksud merupakan gaji keseluruhan yang diterima mencakup gaji pokok dan tunjangan dalam 1 (satu) tahun.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan Purwokerto (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	19-01-2023	2	Evaluasi Kinerja 2022 dan Laporan Triwulan IV 2022.
2	17-02-2023	2	Evaluasi Kinerja bulan Januari 2023 dan tindak lanjut Hasil Audit Kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2022.
3	17-03-2023	2	Evaluasi Kinerja bulan Pebruari 2023 dan perubahan SOTK.
4	08-04-2023	3	Evaluasi kinerja bulan Maret 2023.
5	28-04-2023	3	Laporan Triwulan I tahun 2023, pengelolaan Dana Kesejahteraan Pegawai Atas Laba Tahun 2022, dan evaluasi keanggotaan komite.
6	12-05-2023	3	Evaluasi capaian kinerja 2023.
7	16-06-2023	3	Monitoring Hasil Kinerja Keuangan bulan Mei 2023, persetujuan pengangkatan Pejabat Struktural dan Mutasi Pegawai antar Unit Kerja, dan pembahasan Perubahan RBB 2023.
8	14-07-2023	3	Pembahasan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Semester I tahun 2023, dan pembahasan Monev Triwulan II tahun 2023.
9	26-08-2023	3	Evaluasi Kinerja 31 Juli 2023, tindak lanjut Bintek Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) Pancek KPK, tindak lanjut Validasi Laporan Hasil Penilaian Sendiri PUJK tahun 2022, metode Perhitungan CKPN Dalam Rangka Implementasi SAK-EP, Pengelolaan Dana Kesra dan DPLK, dan Pembahasan Persetujuan Peraturan Direksi.
10	29-09-2023	3	Evaluasi kinerja sampai dengan Agustus 2023.
11	06-10-2023	3	Monitoring pencapaian RBB sampai dengan triwulan III tahun 2024.
12	13-11-2023	3	Pembahasan penyusunan RBB tahun 2024.

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Jumlah peserta Anggota Dewan Komisaris yang hadir mengalami perubahan disebabkan masa jabatan Komisaris Utama berakhir pada 25 Mei 2022.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan Purwokerto (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	Agus Prasutio, S.H., M.Si.	9	0	75,00
2	Wahyu Widiarto, S.E., M.Si.	12	0	100,00
3	Drs. Sugeng, M.M., M.Si.	12	0	100,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Kehadiran Komisaris Utama sebesar 75% disebabkan masa jabatan Komisaris Utama dimulai pada bulan April 2024. Kehadiran Dewan Komisaris tidak hanya dihitung dari kehadiran di Kantor Pusat, namun juga kehadiran di Kantor Cabang. BPR memiliki bukti daftar kehadiran (buku absensi).

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan Purwokerto (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak terdapat kejadian fraud.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan Purwokerto (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	1	0
Total	1	0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Adanya gugatan dari pemilik agunan terkait wanprestasi dari debitur selaku peminjam agunan. Proses kredit terkait penggunaan dan pengikatan agunan atas sepengetahuan dan seijin tertulis serta dilaksanakan dihadapan Notaris. Pada saat laporan disampaikan, proses penyelesaian masih berjalan dan belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan Purwokerto (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak terdapat benturan kepentingan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan Purwokerto (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	20230609	Kegiatan Sosial	CSR PERINGATAN HUT KE-44 SMP NEGERI 8 PURWOKERTO	SMP NEGERI 8 PURWOKERTO	3.000.000
2	20230805	Kegiatan Sosial	CSR BANTUAN LOMBA PERPUSTAKAAN TINGKAT NASIONAL THN 2023 SMA NEGERI 1 AJIBARANG	SMA NEGERI 1 AJIBARANG	20.000.000
3	20230829	Kegiatan Sosial	CSR BEASISWA PENDIDIKAN DLM RANGKA OJK GOES TO SCHOOL 2023	SISWA SESUAI SASARAN PROGRAM	2.500.000
4	20230912	Kegiatan Sosial	CSR BANTUAN GRAND FINAL LOMBA PERPUSTAKAAN TERBAIK NASIONAL TAHUN 2023 SMA NEGERI 1 AJIBARANG	SMA NEGERI 1 AJIBARANG	5.000.000
5	20231017	Kegiatan Sosial	CSR KEGIATAN BULAN INKLUSI KEUANGAN (BIK) 2023 DI DESA PEKUNDEK KECAMATAN BANYUMAS	DESA PEKUNDEK KECAMATAN BANYUMAS	5.810.000
6	20231103	Kegiatan Sosial	BANTUAN CSR HUT SMA N 1 BANYUMAS KE 50 TH 2023	SMA N 1 BANYUMAS	1.500.000
7	20231108	Kegiatan Sosial	BANTUAN CSR SMK BINA TARUNA PURWOKERTO	SMK BINA TARUNA PURWOKERTO	1.000.000
8	20231116	Kegiatan Sosial	CSR KEGIATAN HUT PGRI KABUPATEN BANYUMAS KE 78	PGRI KABUPATEN BANYUMAS	1.000.000
9	20231228	Kegiatan Sosial	CSR BANTUAN DOORPRIZE DLM RANGKA MEPERINGATI HARI GURU NASIONAL KE 78	PGRI KABUPATEN BANYUMAS	120.000
10	20230202	Kegiatan Sosial	CSR BANTUAN MODAL KERJA KEPADA 10 ORANG	10 WARGA KABUPATEN BANYUMAS	25.000.000
11	20230222	Kegiatan Sosial	CSR KEGIATAN SOSIAL DALAM RANGKA ROADSHOW SEPEDA SANTAI UNDIAN	WARGA KABUPATEN BANYUMAS	10.000.000
12	20230427	Kegiatan Sosial	CSR KEGIATAN PASAR MURAH DALAM RANGKA HARI RAYA IDUL FITRI	WARGA SASARAN PASAR MURAH	2.950.000
13	20230515	Kegiatan Sosial	CSR KEGIATAN PASAR MURAH DALAM RANGKA TMMD SENGKUYUNG DI DESA BANJARPANEPEN KEC SUMPIUH	WARGA SASARAN TMMD SENGKUYUNG DI DESA BANJARPANEPEN KEC SUMPIUH	3.080.000
14	20230516	Kegiatan Sosial	CSR BURSA UMKM DESA BINAAN	WARGA BINAAN BPR	778.000
15	20230630	Kegiatan Sosial	CSR BANTUAN PERBAIKAN GEROBAG WARUNG BU KUSMINI	BU KUSMINI	1.200.000
16	20230707	Kegiatan Sosial	CSR BAGI PETANI PENDERES KABUPATEN BANYUMAS TAHAP II	WARGA KABUPATEN BANYUMAS	8.400.000
17	20230717	Kegiatan Sosial	CSR KEGIATAN PASAR MURAH DALAM RANGKA TMMD REGULER KE-117 DI DESA LUMBIR KEC LUMBIR	WARGA SASARAN PASAR MURAH TMMD REGULER KE-117 DI DESA LUMBIR KEC LUMBIR	2.500.000

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan Purwokerto (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
18	20230914	Kegiatan Sosial	CSR JERAMI FEST 2 GELAR UMKM DAN SENI BUDAYA KARANGLEWAS	WARGA KECAMATAN KARANGLEWAS	3.000.000
19	20230922	Kegiatan Sosial	CSR KEGIATAN PASAR MURAH DLM RANGKA TMMD SENGKUYUNG TAHAP III DI DESA CIKAKAK KEC WANGON	WARGA SASARAN TMMD SENGKUYUNG TAHAP III DI DESA CIKAKAK KEC WANGON	2.500.000
20	20231027	Kegiatan Sosial	CSR PAKET SEMBAKO & KURSI RODA DLM RANGKA KUNJUNGAN / SILAHTURAHMI BAPAK PJ BUPATI BANYUMAS KEC PATI	WARGA KECAMATAN PATIKRAJA	1.966.000
21	20231107	Kegiatan Sosial	CSR PEMBAYARAN BPJS KETENAGAKERJAAN BAGI PETANI PENDERES KAB BANYUMAS BLN NOVEMBER DAN DESEMBER 2023	PESERTA BPJS PENDERES	16.800.000
22	20231114	Kegiatan Sosial	CSR WISATA PERTAPAN DESA GERDUREN KECAMATAN PURWOJATI	DESA GERDUREN KECAMATAN PURWOJATI	1.000.000
23	20231114	Kegiatan Sosial	CSR 30 PAKET SEMBAKO UNTUK DESA PARUNGKAMAL KECAMATAN LUMBIR	DESA PARUNGKAMAL KECAMATAN LUMBIR	2.241.000
24	20231115	Kegiatan Sosial	CSR BANTUAN PAKET SEMBAKO GRATIS & RTLH DLM RANGKA KUNJUNGAN PJ BUPATI BANYUMAS KE KEC TAMBAK&KALIBAGO	WARGA KEC TAMBAK & KALIBAGOR	17.840.000
25	20231122	Kegiatan Sosial	PEMBERIAN SANTUNAN 25 PAKET SEMBAKO DALAM RANGKA PJ BUPATI BANYUMAS	WARGA KABUPATEN BANYUMAS	1.875.000
26	20231122	Kegiatan Sosial	PEMBELIAN CSR KAMBING ETAWA KE KELOMPOK CIKAL DADI DALAM RANGKA KUNJUNGAN PJ BUPAT BANYUMAS	WARGA KABUPATEN BANYUMAS	4.500.000
27	20231130	Kegiatan Sosial	CSR SARANA DAN PRASARANA ZONA KULINER PURWASERA KEC PURWANEGARA	ZONA KULINER PURWASERA KEC PURWANEGARA	1.000.000
28	20231130	Kegiatan Sosial	CSR KEGIATAN SARAHSIMAS DI KEL TANJUNG KEC PWT SELATAN & DESA KEMAWI KEC SOMAGEDE	KEL TANJUNG KEC PWT SELATAN & DESA KEMAWI KEC SOMAGEDE	2.217.000
29	20231130	Kegiatan Sosial	CSR KEGIATAN GERAKAN PANGAN MURAH DI KECAMATAN SUMBANG	KECAMATAN SUMBANG	1.500.000
30	20231202	Kegiatan Sosial	CSR SEMBAKO MURAH KEL. PASIR KIDUL	WARGA KEL. PASIR KIDUL	967.000
31	20231208	Kegiatan Sosial	CSR BANTUAN GERAKAN BUMD PROVINSI JAWA TENGAH PEDULI INFLASI SESI 2 : CABAI	WARGA KABUPATEN BANYUMAS	12.000.000
32	20231220	Kegiatan Sosial	CSR KEGIATAN PANGAN MURAH DI KECAMATAN KEDUNGBANTENG	WARGA KECAMATAN KEDUNGBANTENG	1.467.000
33	20230119	Kegiatan Sosial	CSR BANTUAN 1 BH GEROBAK SAMPAH UNTUK UPTD GOR SATRIA PURWOKERTO	UPTD GOR SATRIA PURWOKERTO	1.500.000

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan Purwokerto (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
34	20230120	Kegiatan Sosial	CSR BANTUAN TONG PLASTIK UTK TPST3R SUMBER MAKMUR CILONGOK	TPST3R SUMBER MAKMUR CILONGOK	850.000
35	20230609	Kegiatan Sosial	CSR BANTUAN 20 TEMPAT SAMPAH KEC. SUMPIUH	KEC. SUMPIUH	696.000
36	20230905	Kegiatan Sosial	CSR PARTISIPASI PEMANTAUAN & PENILAIAN ADIPURA 2023 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. BANYUMAS	DLH KABUPATEN BANYUMAS	7.500.000
37	20231030	Kegiatan Sosial	CSR KEGIATAN GERAKAN PANGAN MURAH DI DESA BOGANGIN DAN DESA KETANDA KEC SUMPIUH	DLH KABUPATEN BANYUMAS	2.000.000
38	20231205	Kegiatan Sosial	CSR KEGIATAN HARI MENANAM POHON NASIONAL (DLH KAB. BANYUMAS)	DLH KABUPATEN BANYUMAS	1.500.000
39	20231221	Kegiatan Sosial	CSR SARANA PRASARANA UNTUK BANK SAMPAH JITU TAMBAKNEGARA DAN OBJEK WISATA DERMAGA SUNGAI SERAYU	WARGA TAMBAKNEGARA DAN OBJEK WISATA DERMAGA SUNGAI SERAYU	3.400.000
40	20230126	Kegiatan Sosial	BANTUAN DANA BENCANA TANAH LONGSOR DESA KARANGSARI KEC. KEBASEN	WARGA DESA KARANGSARI KEC. KEBASEN	9.000.000
41	20230711	Kegiatan Sosial	CSR BANTUAN GEMPA BUMI BANTUL	WARGA TERDAMPAK MUSIBAH GEMPA BANTUL	5.900.000
42	20231201	Kegiatan Sosial	CSR KORBAN BENCANA TANAH LONGSOR DESA BOGANGIN AN YATI	KORBAN BENCANA TANAH LONGSOR DESA BOGANGIN AN YATI	25.000.000
43	20231208	Kegiatan Sosial	CSR BANTUAN PENANGANAN DARURAT ESCAVATOR DI DESA KLINTING KEC. SOMAGEDE	WARGA TERDAMPAK TANAH LONGSOR DESA KLINTING KEC. SOMAGEDE	6.000.000
44	20231218	Kegiatan Sosial	CSR TANAH LONGSOR DI DESA WATUAGUNG KECAMATAN TAMBAK	WARGA TERDAMPAK TANAH LONGSOR DESA WATUAGUNG KEC. TAMBAK	10.000.000
45	20230320	Kegiatan Sosial	CSR BPJS BAGI 500 PETANI PENDERES KABUPATEN BANYUMAS	500 PETANI PENDERES KABUPATEN BANYUMAS	8.400.000
46	20230619	Kegiatan Sosial	CSR BANTUAN PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI BAPENDA KABUPATEN BANYUMAS	WARGA SASARAN DALAM KABUPATEN BANYUMAS	1.000.000
47	20230930	Kegiatan Sosial	BANTUAN AIR BERSIH DI 9 (SEMBILAN) KECAMATAN KABUPATEN BANYUMAS	9 KECAMATAN	2.295.000
48	20231102	Kegiatan Sosial	CSR BANTUAN AIR BERSIH DESA PANUSUPAN KEC CILONGOK DAN DESA KEDUNGURANG KEC GUMELAR	DESA PANUSUPAN KEC CILONGOK DAN DESA KEDUNGURANG KEC GUMELAR	565.000
49	20231123	Kegiatan Sosial	CSR BANTUAN PEMBUATAN SARANA MCK DESA KARANGLEWAS KEC JATILAWANG	DESA KARANGLEWAS KEC JATILAWANG	2.515.000

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan Purwokerto (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
50	20231208	Kegiatan Sosial	CSR BANTUAN JAMBANISASI DESA KARANGNANAS KEC. SOKARAJA	DESA KARANGNANAS KEC. SOKARAJA	6.740.000
51	20230209	Kegiatan Sosial	CSR BANTUAN RENOVASI MASJID AR ROFI PWT LOR KEC. PWT TIMUR	MASJID AR ROFI PWT LOR KEC. PWT TIMUR	10.000.000
52	20230222	Kegiatan Sosial	CSR PEMBANGUNAN MASJID BAITUL MUQODDAS KEL KARANGPUCUNG KEC.PURWOKERTO SELATAN	MASJID BAITUL MUQODDAS KEL KARANGPUCUNG KEC.PURWOKERTO SELATAN	4.130.000
53	20230228	Kegiatan Sosial	CSR BANTUAN PEMBANGUNAN MUSHOLA AL IKHLAS KELURAHAN BOBOSAN PURWOKERTO UTARA	MUSHOLA AL IKHLAS KELURAHAN BOBOSAN PURWOKERTO UTARA	1.000.000
54	20230228	Kegiatan Sosial	CSR BANTUAN PEMBANGUNAN MASJID BANTARWUNI DESA WANGON	MASJID BANTARWUNI DESA WANGON	1.500.000
55	20230228	Kegiatan Sosial	CSR BANTUAN PEMBANGUNAN MASJID BAITUL MUTTAQIEN DESA KALIWANGI KECAMATAN PURWOJATI	MASJID BAITUL MUTTAQIEN DESA KALIWANGI KECAMATAN PURWOJATI	1.000.000
56	20230313	Kegiatan Sosial	BANTUAN PEMBANGUNAN MASJID AL HIDAYAH DESA BASEH (DANA CSR)	MASJID AL HIDAYAH DESA BASEH	1.000.000
57	20230327	Kegiatan Sosial	CSR BANTUAN PEMBANGUNAN MASJID AS SALAM BABAKAN DESA CIHONJE KEC GUMELAR	MASJID AS SALAM BABAKAN DESA CIHONJE KEC GUMELAR	1.500.000
58	20230328	Kegiatan Sosial	CSR BANTUAN AMALIAH RAMADHAN 1444 H MASJID AGUNG BAITUSSALAM PURWOKERTO	MASJID AGUNG BAITUSSALAM PURWOKERTO	1.500.000
59	20230330	Kegiatan Sosial	CSR KEGIATAN SOSIAL BAGI TAKJIL RAMADHAN TAHUN 2023	WAARGA KABUPATEN BANYUMAS	20.000.000
60	20230531	Kegiatan Sosial	CSR SARANA DAN PRASARANA MUSHOLA BAITUL JANNAH DESA KEBASEN	MUSHOLA BAITUL JANNAH DESA KEBASEN	1.000.000
61	20230613	Kegiatan Sosial	CSR KEGIATAN SILATURAHMI PEDAGANG KAKI LIMA GOR SATRIA PURWOKERTO TAHUN 2023	PEDAGANG KAKI LIMA GOR SATRIA PURWOKERTO	5.000.000
62	20230623	Kegiatan Sosial	CSR BANTUAN DANA EPMBANGUNAN GEDUNG TPA AL INNAYAH DESA NOTOG KECAMATAN PATIKRAJA	TPA AL INNAYAH DESA NOTOG KECAMATAN PATIKRAJA	5.000.000
63	20230623	Kegiatan Sosial	PEMBERIAN DANA CSR BANTUAN PEMBANGUNAN MASJID SUBULUSSALAM DESA KARANGSALAM KECAMATAN KEMRANJEN	MASJID SUBULUSSALAM DESA KARANGSALAM KECAMATAN KEMRANJEN	2.000.000
64	20230630	Kegiatan Sosial	PEMBELIAN 12 HEWAN QURBAN 1444 H DI WILAYAH KABUPATEN BANYUMAS	12 KECAMATAN DI KABUPATEN BANYUMAS	55.750.000
65	20230725	Kegiatan Sosial	CSR PERINGATAN 1 MUHARAM 1445 H DESA KLAHANG KECAMATAN SOKARAJA	DESA KLAHANG KECAMATAN SOKARAJA	1.000.000

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan Purwokerto (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
66	20230803	Kegiatan Sosial	CSR BANYUMAS MENGAJI KORPS PEMUDA MASJID AGUNG BAITUSSALAM	KORPS PEMUDA MASJID AGUNG BAITUSSALAM	500.000
67	20230803	Kegiatan Sosial	CSR PASIR KIDUL BERSHOLAWAT 2023	DESA PASIR KIDUL	500.000
68	20230823	Kegiatan Sosial	CSR SANTUNAN DHUAF, MUALLAF, ANAK YATIM KOMUNITAS ISLAM TIONGHOA INDONESIA THN 2023	DHUAF, MUALLAF, ANAK YATIM	1.000.000
69	20230829	Kegiatan Sosial	CSR BANTUAN PEMBANGUNAN MASJID BAITUSALAM TIPAR KIDUL	MASJID BAITUSALAM TIPAR KIDUL	1.000.000
70	20230911	Kegiatan Sosial	CSR PEMBANGUNAN MUSHOLA AL MUKAROMAH DESA KECILA KECAMATAN KEMRANJEN	MUSHOLA AL MUKAROMAH DESA KECILA KECAMATAN KEMRANJEN	500.000
71	20230930	Kegiatan Sosial	CSR PEMBANGUNAN GEDUNG TPQ ATHOILLAH DESA SIBALUNG RT 02 RW 01 KECAMATAN KEMRANJEN	TPQ ATHOILLAH DESA SIBALUNG RT 02 RW 01 KECAMATAN KEMRANJEN	2.500.000
72	20231006	Kegiatan Sosial	CSR PEMBANGUNAN MASJID SMP N 9 PURWOKERTO	SMP N 9 PURWOKERTO	1.000.000
73	20231017	Kegiatan Sosial	CSR KEGIATAN PERINGATAN HARI SANTRI NASIONAL TINGKAT KECAMATAN KEDUNGBANTENG THN 2023	KECAMATAN KEDUNGBANTENG	2.000.000
74	20231020	Kegiatan Sosial	CSR KEGIATAN PERUNGATAN HR SANTRI NAS TH 2023 KEC TAMBAK	KECAMATAN TAMBAK	2.000.000
75	20231025	Kegiatan Sosial	CSR KEGIATAN SUMAMPIR BERSHOLAWAT	KELURAHAN SUMAMPIR	2.500.000
76	20231031	Kegiatan Sosial	CSR BANTUAN RENOVASI MASJID BAITUSSALAM TIPAR KIDUL	MASJID BAITUSSALAM TIPAR KIDUL	1.500.000
77	20231107	Kegiatan Sosial	CSR KEGIATAN TELUK BERSATU BERSHOLAWAT & SANTUNAN ANAK YATIM KEL TELUK KEC PWT SELATAN	ANAK YATIM KEL TELUK KEC PWT SELATAN	1.000.000
78	20231211	Kegiatan Sosial	CSR KEGIATAN TABLIGH AKBAR, SANTUNAN YATIM, DHUAF & MUALLAF YAYASAN LAKSAMANA CHENG HO DESA PLIKEN	YATIM, DHUAF & MUALLAF YAYASAN LAKSAMANA CHENG HO DESA PLIKEN	1.000.000
79	20231214	Kegiatan Sosial	CSR PEMBANGUNAN MUSHOLA DESA SAMUDRA KULON	DESA SAMUDRA KULON	1.000.000
80	20231230	Kegiatan Sosial	CSR BANTUAN KEGIATAN NATAL BERSAMA UMAT KRISTIANI, TNI & POLRI SE-KABUPATEN BANYUMAS 2023	PANITIA KEGIATAN	30.000.000
81	20230222	Kegiatan Sosial	CSR FESTIVAL DURIAN TH 2023	WARGA KABUPATEN BANYUMAS	1.000.000
82	20230307	Kegiatan Sosial	CSR SPONSOR ULANG TAHUN ASPIRASI WONG BANYUMAS THN 2023	WARGA KABUPATEN BANYUMAS (PANITIA)	7.500.000
83	20230403	Kegiatan Sosial	CSR PENANGGULANGAN KEMISKINAN EXSTRIM TAHUN 2023 UNTUK 25WARGA	WARGA KABUPATEN BANYUMAS	25.000.000

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan Purwokerto (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
84	20230509	Kegiatan Sosial	CSR KEGIATAN SOSIAL DALAM RANGKA ROADSHOW SEPEDA SANTAI UNDIAN TGL 09-05-2023	WARGA KABUPATEN BANYUMAS	2.000.000
85	20230509	Kegiatan Sosial	CSR RTLH DESA BANJARPANEPEN KECAMATAN SUMPIUH	WARGA DESA BANJARPANEPEN KECAMATAN SUMPIUH	20.000.000
86	20230515	Kegiatan Sosial	CSR BANTUAN 1 BUAH KURSI RODA	WARGA KABUPATEN BANYUMAS	1.700.000
87	20230519	Kegiatan Sosial	CSR BANTUAN SELAMATAN RUWAT BUMI (SURAN) DESA KALIKIDANG KECAMATAN SOKARAJA	DESA KALIKIDANG KECAMATAN SOKARAJA	1.500.000
88	20230619	Kegiatan Sosial	CSR PARTISIPASI KEGIATAN ANUGERAH DESA WISATA	WARGA KABUPATEN BANYUMAS	4.500.000
89	20230711	Kegiatan Sosial	CSR RTLH DESA LUMBIR KECAMATAN LUMBIR	WARGA DESA LUMBIR KECAMATAN LUMBIR	20.000.000
90	20230725	Kegiatan Sosial	CSR KEGIATAN FESTIVAL BEDUG KE 9 KECAMATAN SOKARAJA	9 KECAMATAN	2.000.000
91	20230804	Kegiatan Sosial	CSR SEDEKAH BUMI DESA KARANGSALAM KIDUL KECAMATAN KEDUNGBANTENG	DESA KARANGSALAM KIDUL KECAMATAN KEDUNGBANTENG	750.000
92	20230809	Kegiatan Sosial	CSR KEGIATAN SANTUNAN BAGI ANAK YATIM/PIATU DAN JANDA DHUAFa KELURAHAN SUMAMPIR	ANAK YATIM/PIATU DAN JANDA DHUAFa KELURAHAN SUMAMPIR	1.000.000
93	20230816	Kegiatan Sosial	CSR KEGIATAN SOCIAL MENTAL CARE TAHUN 2023 UINSAIZU DI CILONGOK	UINSAIZU	500.000
94	20230818	Kegiatan Sosial	CSR KEGIATAN LATAR IRENG CULTURE FESTIVAL DESA TAMBAKNEGARA	DESA TAMBAKNEGARA	1.000.000
95	20230830	Kegiatan Sosial	CSR KEGIATAN PEMENTASAN GELAR TARI JAWA TENGAH DI SURAKARTA	PESERTA PEMENTASAN (PANITIA)	1.000.000
96	20230913	Kegiatan Sosial	CSR KORBAN KEBAKARAN DESA KEDUNGURANG,KECAMATAN GUMELAR	WARGA DESA KEDUNGURANG,KECAMATAN GUMELAR	2.500.000
97	20230915	Kegiatan Sosial	CSR KEGIATAN SANTUNAN ANAK YATIM PIATU MEDIA ONLINE SWANARA KEC SOKARAJA	ANAK YATIM PIATU MEDIA ONLINE SWANARA KEC SOKARAJA	500.000
98	20230915	Kegiatan Sosial	CSR SANTUNAN ANAK YATIM PIATU PERINGATAN HUT KE 15 PAGUYUBAN SUGENG	ANAK YATIM PIATU PERINGATAN HUT KE 15 PAGUYUBAN SUGENG	1.500.000
99	20230918	Kegiatan Sosial	CSR RTLH DESA CIKAKAK KEC. WANGON TGL 20/09/2023	WARGA PENERIMA RTLH DESA CIKAKAK KEC. WANGON	20.000.000
100	20231230	Kegiatan Sosial	LAIN-LAIN UNTUK 63 KEGIATAN (KOLOM TIDAK MENCIUKUPI)	SESUAI RINCIAN	233.127.000

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan Purwokerto (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Total Dana CSR yang dapat tersalurkan di Tahun 2023 sebesar Rp.766.029.000

Nama BPR	: PT Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan Purwokerto (Perseroda)
Posisi Laporan	: 31-12-2023
Alamat	: Jl. RA Wiryaatmaja No. 44 Purwokerto Jawa Tengah
Nomor Telepon	: 0281627513
Modal Inti BPR	: 120.970.920.452,00
Total Aset BPR	: 989.886.516.443,00
Bobot BPR	: D
Status Audit Ekstern	: Diaudit
Nilai Komposit	: 1,8
Peringkat Komposit	: 2
Analisis	: Secara Struktur dan infrastruktur tata kelola terkait kelengkapan Direksi dan Dewan Komisaris, masih terdapat jumlah komisaris independen belum memenuhi setengah dari jumlah Dewan Komisaris. BPR telah memiliki tiga orang anggota Direksi yang salah satunya bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan serta bertindak independen dari operasional atau aktivitas penyaluran dan penghimpunan dana. Tempat tinggal Direksi dan Komisaris juga sesuai dengan ketentuan. Tidak terdapat rangkap jabatan baik oleh Direksi maupun Dewan Komisaris. Tidak terdapat hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua baik sesama Direksi maupun dengan Dewan Komisaris. Pelaksanaan tugas Direksi maupun Dewan Komisaris dilaksanakan secara profesional, independen. Direksi dan Dewan Komisaris juga secara rutin melaksanakan rapat. Namun demikian, terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola, diantaranya BPR belum memiliki program rekrutmen anggota SKAI meskipun telah memiliki program pengembangan SDM anggota SKAI, ketentuan keanggotaan Komite-komite dibawah Dewan Komisaris belum sepenuhnya sesuai ketentuan OJK, dan masih belum dilaksakannya ketentuan/proses pemberian kredit besar sebagaimana diatur dalam POJK terkait kewajiban pelaksanaan perhitungan tingkat kolektibilitas berbasis 3 pilar.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan Purwokerto (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,200	0,50	0,50	0,16	1,16	0.232	Dari sisi Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Direksi Bank telah memenuhi seluruh ketentuan yang diatur dalam POJK.
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,125	0,67	0,55	0,20	1,42	0.178	Jumlah Komisaris Independen belum mencapai 50% dari jumlah Komisaris.
Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,025	2,00	0,40	0,10	2,50	0.063	Terdapat rangkap jabatan kenggotaan Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.
Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan	0,100	1,00	0,40	0,10	1,50	0.150	Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian terkait benturan kepentingan.
Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR	0,100	0,60	1,04	0,17	1,81	0.181	Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak merangkap sebagai Direktur Utama, tidak membawahkan bidang operasional pengumpulan dan penyaluran dana dan mampu bekerja secara independen.
Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern	0,100	0,90	0,90	0,15	1,95	0.195	Bank telah membentuk Satuan Kerja Audit Internal, sebagaimana diatur dalam POJK.
Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern	0,025	0,50	0,40	0,10	1,00	0.025	Pelaksanaan audit ekstern sesuai dengan ketentuan.
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0,100	1,17	1,26	0,10	2,53	0.253	Bank telah membentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko, namun jumlah belum memadai sesuai jaringan kantor dan kompleksitas bisnis.
Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit	0,075	2,00	1,60	0,10	3,70	0.278	Masih terdapat kelemahan dalam proses yaitu pemberian kredit kepada pihak terkait telah memenuhi ketentuan OJK tentang BMPK namun terhadap penyaluran kredit besar masih terdapat hal yang belum sepenuhnya memperhatikan prinsip kehati-hatian.
Faktor 10: Rencana bisnis BPR	0,075	0,50	1,00	0,10	1,60	0.120	Rencana Bisnis Bank disusun oleh Direksi, disetujui Dewan Komisaris dan didukung sepenuhnya oleh pemegang saham.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan Purwokerto (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	0,075	1,50	0,60	0,10	2,20	0.165	BPR telah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah sesuai ketentuan. meskipun belum sepenuhnya berjalan namun BPR tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan terutama terkait penggunaan data nasabah tanpa persetujuan nasabah.
Nilai Komposit						1.8	
Peringkat Komposit						Baik	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan Purwokerto (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	Susunan Direksi BPR berjumlah 3 (tiga) orang terdiri dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan.
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Seluruh Direksi bertempat tinggal di Kabupaten yang sama dengan Lokasi Kantor Pusat BPR.
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	1	Anggota Direksi tidak menjabat pada Bank lain. Perusahaan Non Bank maupun lembaga lain yang dilarang oleh ketentuan.
4	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	1	Seluruh anggota Direksi Bank tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Direksi lain maupun Dewan Komsaris.
5	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	1	Direksi bekerja secara independen tanpa menggunakan penasihat perorangan maupun penyedia jasa atau konsultan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.
6	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	1	Seluruh Anggota Direksi BPR lulus uji kemampuan dan kepatutan dan diangkat RUPS termasuk perpanjangannya sebelum habis masa jabatannya.
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan
Purwokerto (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan Purwokerto (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
7	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	1	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak terdapat pemberian kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
8	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	1	Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
9	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	1	Direksi selalu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
10	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	1	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinions jika terdapat perbedaan pendapat.
11	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	Tidak terdapat penyalahgunaan kepentingan oleh Direksi yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
12	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	2	Terdapat rencana strategis dan terjadwal serta berkelanjutan dan tertuang dalam RBB terkait pembinaan dan pengembangan pengetahuan yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi melalui peningkatan keikutsertaan pegawai dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu namun masih perlu ditingkatkan.
13	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	2	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian namun masih perlu ditingkatkan.
14	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	1	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	1,25	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,50	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan
Purwokerto (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan Purwokerto (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
15	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	1	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
16	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	2	Setiap kebijakan strategis dibidang kepegawaian senantiasa dikomunikasikan kepada seluruh pegawai namun masih perlu ditingkatkan.
17	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	1	Setiap rapat Direksi senantiasa terdokumentasi dengan baik. termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions serta dibagikan kepada seluruh anggota Direksi.
18	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	3	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR. penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR. dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders. namun masih perlu ditingkatkan.
19	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	1	Direksi secara rutin menyampaikan Laporan Tata Kelola kepada pihak yang ditentukan dalam ketentuan.
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	1,60	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,16	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan
Purwokerto (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan Purwokerto (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	1	Anggota Dewan Komisaris berjumlah 3 orang.
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	1	Jumlah Anggota Dewan Komisaris tidak melampaui dengan jumlah Anggota Direksi.
3	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	1	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS.
4	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Seluruh Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal dalam propinsi yang sama dengan lokasi Kantor Pusat Bank.
5	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen; b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen; BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	4	Jumlah Komisaris Independen belum mencapai setengah dari anggota Dewan Komisaris namun proses rekrutmen telah dilaksanakan dan menunggu hasil akhir.
6	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	1	Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	1	Tidak terdapat rangkap jabatan oleh Dewan Komisaris
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	1	Mayoritas Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan
Purwokerto (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan Purwokerto (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
9	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	1	Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
	Total nilai skala penerapan	12	
	Rata-rata	1,33	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,67	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
10	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	2	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian namun masih perlu ditingkatkan.
11	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	3	Dewan Komisaris aktif mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan BPR, namun masih terdapat hal-hal yang belum dilaksanakan, yaitu terkait pelaksanaan APU & PPT di BPR.
12	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	1	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.
13	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	1	Dewan Komisaris aktif memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.
14	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	1	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan
Purwokerto (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan Purwokerto (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
15	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	1	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat. atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.
16	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	Tidak terdapat kegiatan yang memanfaatkan BPR oleh Anggota Dewan Komisaris untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
17	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	1	Anggota Dewan Komisaris aktif dan rutin melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.
	Total nilai skala penerapan	11	
	Rata-rata	1,38	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,55	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
18	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan
Purwokerto (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan Purwokerto (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	4	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko namun masih terdapat perangkapan jabatan untuk kedua komite tersebut.
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	4,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	2,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	1	Komite Audit telah melakukan evaluasi terhadap penerapan audit intern.
2	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	1	Komite Pemantau Risiko telah melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	1	Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	1	Komite telah memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi.
	Total nilai skala penerapan	1	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan
Purwokerto (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan
Purwokerto (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan
Purwokerto (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan Purwokerto (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	2	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian terkait benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam risalah rapat apabila terdapat benturan kepentingan, dalam bentuk Keputusan Direksi dan berlaku terhitung mulai tahun 2022 namun masih perlu ditingkatkan.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	1	Tidak terjadi benturan kepentingan. Apabila terdapat benturan kepentingan, anggota Dewan Komisari, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan.
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
3	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	1	Tidak terjadi benturan kepentingan.
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan
Purwokerto (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan Purwokerto (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan
Purwokerto (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan Purwokerto (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk:</p> <p>a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.</p>	1	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dijabat oleh Direktur Umum dan tidak menjabat sebagai Direktur Utama. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana serta mampu bekerja secara independen.
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.
3	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p>	1	BPR telah membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	2	Satuan kerja kepatuhan telah menyusun pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan namun belum dilakukan pengkinian.
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	1	BPR telah memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggungjawab bagi satuan kerja kepatuhan.
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	1,20	
	Bobot	0,50	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan
Purwokerto (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan Purwokerto (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai struktur	0,60	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	3	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan OJK dan Peraturan perundang-undangan lain termasuk menyampaikan laporan kepada OJK dan otoritas lainnya. namun masih perlu ditingkatkan mengingat masih terdapat temuan yang mengakibatkan terjadinya nominal denda.
7	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi. pelatihan ketentuan terkini secara terjadwal dalam tahun berjalan. namun masih perlu ditingkatkan.
8	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada OJK antara lain dengan senantiasa memantau setiap temuan serta memantau dalam rangka pencegahan termasuk apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan. namun masih perlu ditingkatkan.
9	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	Satuan Kerja Kepatuhan telah memastikan bahwa seluruh kebijakan. ketentuan. sistem. dan prosedur. serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan namun masih terdapat peraturan yang belum dikinikan.
10	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan revidan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	Satuan Kerja Kepatuhan telah melakukan revidan/atau rekomendasi pengkinian dan penyempurnaan kebijakan. ketentuan. sistem maupun prosedur yang ada sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan namun masih perlu ditingkatkan.
	Total nilai skala penerapan	13	
	Rata-rata	2,60	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,04	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	3	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan. namun masih perlu ditingkatkan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan
Purwokerto (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan Purwokerto (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
12	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sudah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.
13	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Tidak terjadi pelanggaran atau penyimpangan
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	1,67	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,17	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan
Purwokerto (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan Purwokerto (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	1	BPR telah memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).
2	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	3	SKAI telah memiliki pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris namun BPR belum melakukan pengkinian.
3	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	1	SKAI yang dibentuk independen terhadap satuan kerja operasional.
4	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	1	SKAI bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama.
5	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	3	BPR telah memiliki program rekrutmen dan program pengembangan SDM untuk anggota SKAI namun masih perlu disempurnakan.
	Total nilai skala penerapan	9	
	Rata-rata	1,80	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,90	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	3	BPR telah menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat. namun masih perlu ditingkatkan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan
Purwokerto (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan Purwokerto (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
7	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	1	BPR telah menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang dan untuk pelaksanaannya yang terbaru pada tahun 2023.
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	3	Pelaksanaan fungsi audit intern dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit. namun masih perlu ditingkatkan.
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	2	BPR telah melaksanakan peningkatan mutu ketrampilan SDM secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern. namun masih perlu ditingkatkan.
	Total nilai skala penerapan	9	
	Rata-rata	2,25	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,90	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
10	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	3	SKAI telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris namun belum memberi tembusan kepada Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
11	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila terdapat penyimpangan) kepada OJK sesuai ketentuan OJK.
12	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	1	BPR telah melaksanakan kaji ulang. dan telah menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada OJK.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan
Purwokerto (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan Purwokerto (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
13	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p>	1	BPR telah melaksanakan pelaporan pengangkatan atau pemberhentian kepala SKAI kepada OJK sesuai ketentuan OJK.
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,15	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan
Purwokerto (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Raga Surya Nuansa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	-
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	-
2	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	-
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	-
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	-
	Total nilai skala penerapan	0	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Raga Surya Nuansa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Raga Surya Nuansa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,00	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Raga Surya Nuansa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan Purwokerto (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.</p>	1	BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	3	BPR telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.
3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan namun masih perlu disempurnakan.
	Total nilai skala penerapan	7	
	Rata-rata	2,33	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,17	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
4	<p>Direksi:</p> <p>a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan</p> <p>b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.</p>	3	Direksi telah menyusun kebijakan dan pedoman Penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan mengevaluasi serta memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi namun masih perlu ditingkatkan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan
Purwokerto (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan Purwokerto (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
5	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	3	Dewan Komisaris telah menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko. dan mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris. namun masih perlu ditingkatkan.
6	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	4	BPR telah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor risiko yang bersifat menyeluruh. namun masih perlu ditingkatkan.
7	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	3	BPR telah menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh. namun masih perlu ditingkatkan.
8	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	BPR telah menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan namun masih perlu ditingkatkan.
9	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	3	BPR telah memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh namun masih perlu ditingkatkan.
10	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	3	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko. namun masih perlu ditingkatkan.
	Total nilai skala penerapan	22	
	Rata-rata	3,14	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,26	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan Profil Risiko telah disusun dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
12	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Tidak terdapat produk dan aktivitas baru yang harus dilaporkan kepada OJK.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan Purwokerto (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan Purwokerto (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan
Purwokerto (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan Purwokerto (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	4	Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, namun belum kepada debitur besar dan masih terdapat kelemahan dalam monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	4,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	2,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	4	BPR belum mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	4	Proses pemberian kredit kepada pihak terkait telah memenuhi ketentuan OJK tentang BMPK namun terhadap penyaluran kredit besar masih terdapat hal yang belum sepenuhnya memperhatikan prinsip kehati-hatian.
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	4,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,60	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada OJK secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan OJK.
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Tidak terdapat pelanggaran BMPK.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan Purwokerto (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan
Purwokerto (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan
Purwokerto (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan Purwokerto (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	1	Rencana Bisnis Bank telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Rencana Bisnis Bank menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	1	Rencana Bisnis Bank didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	3	Rencana Bisnis Bank disusun dengan mempertimbangkan hal-hal: faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian, dan penerapan manajemen risiko. namun masih perlu meningkatkan faktor eksternal yang berpengaruh signifikan terhadap core bisnis BPR. Sebagai contoh: tingkat persaingan.
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	2	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan RBB dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin, dan terdokumentasi.
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	2,50	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan Purwokerto (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan
Purwokerto (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Rencana Bisnis termasuk perubahannya telah disampaikan kepada OJK sesuai ketentuan.
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan Purwokerto (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan Purwokerto (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	3	BPR telah memiliki sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk SDM yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh. namun masih perlu ditingkatkan.
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulan sesuai ketentuan.
3	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan.
4	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	BPR telah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah sesuai ketentuan. meskipun belum sepenuhnya berjalan namun BPR tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan terutama terkait penggunaan data nasabah tanpa persetujuan nasabah namun masih perlu ditingkatkan.
5	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan. sesuai ketentuan.
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,60	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan Purwokerto (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan Purwokerto (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
6	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi telah ditandatangani oleh Direksi. disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada OJK dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan OJK.
7	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	1	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan telah disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan
Purwokerto (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023



PT BPR BKK PURWOKERTO (PERSERODA)

Misi: Terpercaya dan Terpercaya
BANK MILIK PEMERINTAH

KANTOR PUSAT

Jl. RA WIRYATMAJA NO. 44 KEDUNGWULUH, PURWOKERTO BARAT 53131, BANYUMAS
Telp. (0281) 627 513, 627 516 Fax. (0281) 627 518 E-Mail : kantor.pusat@bprbkk-pwt.co.id

LEMBAR PERSETUJUAN & PENANDATANGANAN
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PT BPR BKK PURWOKERTO (PERSERODA)
TAHUN 2023

Purwokerto, 31 Januari 2024

Disetujui dan ditandatangani oleh:



SUGENG PRIJONO, S.E., M.M.
Direktur Utama



AGUS PRASUTIO, SH, M.Si.
Komisaris Utama